

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Kualitas Laporan Keuangan

Ni Putu Jesica Prastiwi¹
Ni Putu Sri Harta Mimba²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: jesica.prastiwi@gmail.com/ Telp : 081987293721

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling* yakni sebanyak 100 sampel. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey dengan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Kata Kunci : sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi berbasis akrual, kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of internal control systems, human resource competencies, and the application of accrual based accounting on the quality of financial statements. This study uses an associative quantitative approach which aims to determine the relationship between internal control systems, human resource competencies, the application of accrual-based accounting with the quality of financial statements. This study using conducted non-probability sampling method, namely by using a purposive sampling technique using 100 samples. Methods of data collection for this study is survey methods with questionnaires. Hypotheses test use logistic regression to predict the probability of the occurrence of an event that match the data on the logit logistic curve function. The results show that the internal control system has a positive influence on the quality of financial statements in the Regional Financial and Asset Management Agency of Bali Province. Human resource competency has a positive influence on the quality of financial reports Regional Assets of the Province of Bali.

Keywords : internal control system, human resource competence, application of accrual-based accounting, quality of financial statements

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum (Soimah, 2014). Adanya tuntutan dari masyarakat itulah yang membuat pemerintah harus transparan serta akuntabel dalam menjalankan pengelolaan Negara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan laporan keuangan (Pramudiarta, 2015).

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II Tahun 2016, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 489 objek pemeriksaan di pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut meliputi 9 objek pemeriksaan LKPD, 268 objek pemeriksaan kinerja, dan 212 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan mengungkapkan 4.520 temuan yang di dalamnya terdapat 5.674 permasalahan senilai Rp 2,98 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 860 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 4.814 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 2,98 triliun. Menurut Pramudiarta, (2015), informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai, Oleh karena itu pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan oleh laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU No. 01 Tahun 2004. Menurut (Herawti, 2014), peran sistem pengendalian intern adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Negara.

Hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2014 yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan operasinya dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015. Dalam menghasilkan penyusunan laporan keuangan

yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. (Pramudiarta, 2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Kompetensi menurut Guy *et al* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti tulisan dalam temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali pada tahun 2014 yang memberikan opini "Wajar Tanpa Pengeualian", pada tahun 2016 BPK RI memberi opini yang sama yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian". Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014). Karakteristik kualitatif yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hal inilah yang mendasari pemerintah, sehingga pada tahun 2010 Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual

(*cash toward accrual*). Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (Guthrie, 1998) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan (Ekrem Kara, 2011).

Penerapan akuntansi berbasis akrual harus diterapkan secara hati-hati mengingat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual baru diterbitkan dan belum diimplementasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, kondisi diatas bagaimanapun akan memungkinkan timbulnya kesulitan dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual, bagi kalangan yang baru menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual, peralihan ini menuntut waktu untuk memahaminya (Sumardi, 2008). Ada sedikit bukti tentang manfaat yang terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, sementara akademisi telah meremehkan pentingnya akuntansi akrual di sektor publik (Lapsley, Mussari, & Paulsson, 2009). Namun, banyak penelitian telah menganjurkan superioritas akuntansi berbasis akrual dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas sehingga alasan mengapa banyak organisasi sektor publik internasional telah mengadopsi atau sedang dalam proses menerapkan prinsip akuntansi akrual (Connolly & Hyndman, 2006).

Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Tickell, 2010). Fery Taufik dari Kementrian Dirjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi menyatakan bahwa hambatan yang akan dialami adalah sulitnya pola pikir staf atau pejabat pengelola keuangan, kerumitan, dan beragamnya transaksi keuangan yang dicatat secara akrual, jumlah tenaga pelatih di pemerintahan yang mampu mendidik akuntansi akrual terbatas serta membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk mengembangkan sistem yang handal.

Penelitian mengenai pengaruh akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Christanti (2010) pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Indriasari & Nahartyo (2008), Andriani (2010), Wansyah dkk (2012), Marda (2013), serta Sari dan Witono (2014) juga menemukan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Untary (2015) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, untuk menjelaskan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dan untuk menjelaskan pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berupa tambahan bukti empiris bagi akademisi dan peneliti lain terkait dengan pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan akuntansi berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan sedangkan berdasarkan aspek praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran, bahan pertimbangan dan masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan akuntansi berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Desain atau rancangan penelitian merupakan struktur atau strategi penelitian mengenai langkah awal hingga akhir mengenai tata cara yang dilakukan dalam penelitian ini membentuk proses dan hasil objektif, efektif, valid, dan efisiensi untuk menjawab pertanyaan yang ada. Desain penelitian juga menguraikan tentang pendekatan yang cocok digunakan untuk mendapat jawaban masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk naratif.

Penelitian naratif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:206). Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat hubungan antar variabel dependen dan independen.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 01 Niti Mandala Renon. Pemilihan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Menurut (Sugiyono, 2017:38), obyek penelitian merupakan suatu sifat dari obyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan memperoleh kesimpulan. Obyek penelitian ini adalah bagian keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas atau independen (Sugiyono, 2017:59). variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sedangkan variabel independen (variabel bebas) adalah suatu variabel yang mempunyai atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau dependen (Sugiyono, 2017:59). variabel independen dalam

penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2), Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua (X_3).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Bali. Adapun Bagian-bagian pada Badan Pengelola Keuangan Setda Provinsi Bali adalah Bagian Fasilitas, Evaluasi, Transfer Kab/Kota, Bagian Akuntansi dan Laporan, Bagian Perbendaharaan, dan Bagian Anggaran. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 168 orang Pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:116). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penyampelan dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:122). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 sampel.

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey yakni dengan kuesioner. Kuesioner di sebar pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan pengisiannya di dampingi oleh peneliti.

Pengukuran atas jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Skala ini mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atas sebuah fenomena (Sugiyono, 2017:93). Jawaban dari setiap pertanyaan memiliki skor tersendiri dimulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Masing – masing pernyataan diberikan skor agar mempermudah perhitungan untuk penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan mencatat dengan mengakses situs web www.birokeu.baliprov.go.id. Data tersebut diperoleh dalam bentuk opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 1.
Penentuan Skor

Jawaban	Kode	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	ST	4
Ragu-Ragu	R	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Sugiyono, (2017)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi kedalam dua bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut Data Kualitatif, adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan skema (Sugiyono, 2017:13) seperti penilaian responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Data kualitatif penelitian ini berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan, gambaran umum, dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Data Kuantitatif, adalah data dalam bentuk angka yang dapat dinyatakan dan diukur dengan satuan hitung atau kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2017:13). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data jumlah karyawan

dan tabulasi hasil kuesioner di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Adapun Jenis data menurut sumbernya antara lain Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:402). data primer dalam penelitian ini yaitu berupa jawaban kuesioner dari responden. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017:402). Data sekunder dalam penelitian ini berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan, jumlah karyawan, dan struktur perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa adanya maksud untuk menarik kesimpulan. Hasil statistik deskriptif pada penelitian tersaji pada Tabel 1.5.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	400	6,09	21,68	17,3467	4,27151
X2	400	7,13	26,36	20,8052	5,03228
X3	400	10,21	34,72	27,8897	6,94557
Y	400	,00	1,00	,7500	,43355
Valid N (listwise)	400				

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil yang tersaji pada Tabel 2 menggambarkan statistik pada data yang diuji dalam penelian ini. Penjelasannya adalah nilai minimum pada sistem pengendalian intern (X₁) adalah sebesar 6,09 dan nilai maksimumnya sebesar 21,68. Nilai rata-rata

persepsi responden adalah sebesar 17,35 dengan standar deviasi sebesar 4,27. Deskripsi data pada variabel sistem pengendalian intern menunjukkan kecenderungan persepsi yang baik dari responden terhadap variabel ini.

Nilai minimum pada kompetensi sumber daya manusia (X_2) adalah sebesar 7,13 dan nilai maksimumnya sebesar 26,36. Nilai rata-rata persepsi responden adalah sebesar 20,80 dengan standar deviasi sebesar 5,03. Deskripsi data pada variabel sistem pengendalian intern menunjukkan kecenderungan persepsi yang baik dari responden terhadap variabel ini.

Nilai minimum pada pengaruh akuntansi berbasis akrual (X_3) adalah sebesar 10,21 dan nilai maksimumnya sebesar 34,72. Nilai rata-rata persepsi responden adalah sebesar 27,89 dengan standar deviasi sebesar 6,94. Deskripsi data pada variabel sistem pengendalian intern menunjukkan kecenderungan persepsi yang baik dari responden terhadap variabel ini.

Variabel kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini adalah variabel kategori (*dummy*) dengan nilai nol (0) sebagai Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dan nilai satu (1) sebagai Wajar Tanpa Pengecualian. Nilai rata-rata adalah sebesar 0,75 dengan standar deviasi 0,43. Kualitas laporan keuangan dengan persepsi Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (0) terjadi pada tahun 2013,

Tabel 5.
Deskripsi Jawaban Responden atas Sistem Pengendalian Intern

No	Sistem Pengendalian Intern	Jawaban					Rata-rata
		SS	S	R	TS	STS	
1	Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). Sudah diterapkan PP Nomor 60 Tahun 2008	61	29	10	-	-	4,51
2	tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan	54	35	11	-	-	4,43
3	Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.	63	27	10	-	-	4,53
4	Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.	63	26	11	-	-	4,52
5	Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas pelanggaran terhadap aturan perilaku.	62	28	10	-	-	4,52

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan *Standard Operating Procedure* (SOP) diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 61 orang, 29 orang menjawab setuju (S) dan 10 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,51. Jadi persepsi responden pada penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dapat dikategorikan Sangat Baik.

Sudah diterapkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 54 orang, 35 orang menjawab setuju (S) dan 11 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,43. Jadi persepsi responden pada sudah

diterapkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 63 orang, 27 orang menjawab setuju (S) dan 10 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,53. Jadi persepsi responden pada pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai dapat dikategorikan Sangat Baik.

Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 63 orang, 26 orang menjawab setuju (S) dan 11 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,52. Jadi persepsi responden pada adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi dapat dikategorikan Sangat Baik.

Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas pelanggaran terhadap aturan perilaku diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 62 orang, 28 orang menjawab setuju (S) dan 10 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,52. Jadi persepsi responden padaterdapat tindakan disiplin yang tepat atas pelanggaran terhadap aturan perilakudapat dikategorikan Sangat Baik.

Total jawaban responden dari seluruh aspek yaitu sistem pengendalian intern memiliki nilai rata-rata 22,51 sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Variabel sistem pengendalian intern yang terdiri dari 5 indikator dalam persepsi responden menunjukkan persepsi yang sangat baik, ini berarti kondisi sistem pengendalian intern di BPKAD telah dilaksanakan dengan sangat baik sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Tabel 6.
Deskripsi Jawaban Responden atas Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Jawaban					Rata-rata
		SS	S	R	TS	STS	
1	SDM bagian keuangan minimal lulusan D3 Akuntansi	71	20	9	-	-	4,62
2	SKPD memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi.	55	33	12	-	-	4,43
3	Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.	73	18	9	-	-	4,64
4	Pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan.	62	27	11	-	-	4,51
5	Sub bagian keuangan/akuntansi mendapat pelatihan jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah	52	39	9	-	-	4,43
6	Sub bagian keuangan/akuntansi memahami struktur organisasi pada Dinas tersebut	60	33	7	-	-	4,53

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa SDM bagian keuangan minimal lulusan D3 Akuntansi diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 71 orang, 20 orang menjawab setuju (S) dan 9 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,62. Jadi

persepsi responden pada SDM bagian keuangan minimal lulusan D3 Akuntansi dapat dikategorikan Sangat Baik.

SKPD memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 55orang, 33 orang menjawab setuju (S) dan 12 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,43. Jadi persepsi responden pada SKPD memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi dapat dikategorikan Sangat Baik.

Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerahdiketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 73orang, 18 orang menjawab setuju (S) dan 9 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,64. Jadi persepsi responden padaperan dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerahdapat dikategorikan Sangat Baik.

Pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukandiketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 62orang, 27 orang menjawab setuju (S) dan 11 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,51. Jadi

persepsi responden padapelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukandiketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 62orang, 27 orang menjawab setuju (S) dan 11 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,43. Jadi persepsi responden padapelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Sub bagian keuangan/akuntansi memahami struktur organisasi pada Dinas tersebutdiketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 60orang, 33 orang menjawab setuju (S) dan 7 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,53. Jadi persepsi responden padasub bagian keuangan/akuntansi memahami struktur organisasi pada dinas tersebut dapat dikategorikan Sangat Baik.

Total jawaban responden dari seluruh aspek yaitu kompetensi sumber daya mausia memiliki nilai rata-rata 27,16 sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Variabel kompetensi sumber daya manusia yang terdiri dari 6 indikator dalam persepsi responden menunjukkan persepsi yang sangat baik, ini berarti kondisi kompetensi sumber daya manusia di BPKAD telah dilaksanakan dengan sangat baik sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Tabel 7.
Deskripsi Jawaban Responden atas Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

No	Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jawaban					Rata-rata
		SS	S	R	TS	STS	
1	Sistem akuntansi yang diterapkan pada Dinas ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	79	15	6	-	-	4,73
2	Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi.	65	25	10	-	-	4,55
3	Dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan	69	20	11	-	-	4,58
4	Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi	59	30	11	-	-	4,48
5	Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis	65	25	10	-	-	4,55
6	Dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos – pos yang semestinya.	73	18	9	-	-	4,64
7	Laporan keuangan dibuat setiap periode akuntansi.	75	22	3	-	-	4,72
8	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.	67	28	5	-	-	4,62

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan pada Dinas ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 79 orang, 15 orang menjawab setuju (S) dan 6 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,73. Jadi persepsi responden pada sistem akuntansi yang diterapkan pada Dinas ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat dikategorikan Sangat Baik.

Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 65 orang, 25 orang menjawab setuju (S) dan 10 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai

rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,55. Jadi persepsi responden padasetiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi dapat dikategorikan Sangat Baik.

Dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 69orang, 20 orang menjawab setuju (S) dan 11 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,58. Jadi persepsi responden pada dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 59orang, 30 orang menjawab setuju (S) dan 11 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,48. Jadi persepsi responden pada setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi dapat dikategorikan Sangat Baik.

Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 65 orang, 25 orang menjawab setuju (S) dan 10 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,55. Jadi persepsi responden pada semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis dapat dikategorikan Sangat Baik.

Dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos – pos yang semestinya diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 73 orang, 18

orang menjawab setuju (S) dan 9 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,64. Jadi persepsi responden padadilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos – pos yang semestinya dapat dikategorikan Sangat Baik.

Laporan keuangan dibuat setiap periode akuntansi diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 75 orang, 22 orang menjawab setuju (S) dan 3 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,72. Jadi persepsi responden pada Laporan keuangan dibuat setiap periode akuntansi dapat dikategorikan Sangat Baik.

Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik diketahui responden yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 67 orang, 28 orang menjawab setuju (S) dan 5 orang menjawab ragu-ragu (R). Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 4,62. Jadi persepsi responden padapelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik dapat dikategorikan Sangat Baik.

Total jawaban responden dari seluruh aspek yaitu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memiliki nilai rata-rata 36,87 sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Variabel penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang terdiri dari 8 indikator dalam persepsi responden menunjukkan persepsi yang sangat baik, ini berarti kondisi penerapan akuntansi berbasis akrual di BPKAD telah dilaksanakan dengan sangat

baik sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Kondisi sistem pengendalian intern pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali tergolong sangat baik, kondisi ini didukung oleh 5 indikator yaitu kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP), sudah diterapkan PP 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan. pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi dan terdapat tindakan disiplin yang tepat atas pelanggaran terhadap aturan perilaku.

Kondisi kompetensi sumber daya manusia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali tergolong sangat baik, kondisi ini didukung oleh 6 indikator yaitu SDM bagian keuangan minimal lulusan D3 Akuntansi, SKPD memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyusun LKPD sesuai standar akuntansi, peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah, diberikan pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan, sub bagian keuangan/akuntansi mendapat pelatihan jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah, sub bagian keuangan/akuntansi memahami sruktur organisasi pada dinas tersebut.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di BPKAD tergolong sangat baik, kondisi ini didukung oleh 8 indikator yaitu sistem akuntansi yang diterapkan pada dinas ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap transaksi keuangan pada dinas ini dilakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi, dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan, setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi, semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis, dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya, laporan keuangan dibuat setiap periode akuntansi dan pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.

Kondisi sistem pengendalian intern pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali tergolong sangat baik, kondisi ini didukung oleh 5 indikator yaitu: 1) Kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP), 2) Sudah diterapkan PP 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan, 3) Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, 4) Pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi, 5) Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas pelanggaran terhadap aturan perilaku.

Kondisi pelaksanaan sistem pengendalian intern yang sudah sangat baik tersebut tetap perlu adanya peningkatan, peningkatan yang perlu ditingkatkan yaitu penerapan PP 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan.

Kondisi kompetensi sumber daya manusia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali tergolong sangat baik, kondisi ini didukung oleh 6 indikator yaitu: 1) SDM bagian keuangan minimal lulusan D3 Akuntansi. 2) SKPD memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyusun LKPD sesuai standar akuntansi. 3) Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah. 4) Diberikan pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan. 5) Sub bagian keuangan/akuntansi mendapat pelatihan jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah. 6) Sub bagian keuangan/akuntansi memahami sruktur organisasi pada dinas tersebut

Keberadaan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sudah sangat baik tersebut tetap perlu adanya peningkatan di BPKAD yakni SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menyusun LKPD sesuai standar akuntansi. Agar SDM khususnya sub bagian keuangan memiliki kemampuan tersebut SDM sebaiknya mengikuti pelatihan – pelatihan sehingga LKPD dapat dibuat sesuai dengan standar akuntansi.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di BPKAD tergolong sangat baik, kondisi ini didukung oleh 8 indikator yaitu: 1) Sistem akuntansi yang diterapkan pada dinas ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 2) Setiap transaksi keuangan pada dinas ini dilakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi. 3) Dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan. 4) Setiap transaksi keuangan

harus didukung oleh bukti transaksi. 5) Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis. 6) Dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya. 7) Laporan keuangan dibuat setiap periode akuntansi. 8) Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.

Kondisi pelaksanaan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang sudah sangat baik tersebut tetap perlu adanya peningkatan di BPKAD yakni setiap transaksi keuangan belum didukung oleh bukti transaksi.

Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai bagaimana sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan peranan akuntansi berbasis akrual mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan peranan akuntansi berbasis akrual dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini kondisi sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan peranan akuntansi berbasis akrual akan menunjang kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam mengatasi konflik kepentingan serta dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Bagi perusahaan atau organisasi agar tetap mempertahankan sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan peranan akuntansi berbasis akrual yang dimiliki untuk dapat menghasilkan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka secara umum dapat dinyatakan adanya kesesuaian antara ketiga variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016. Rincian dari simpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut kondisi sistem pengendalian intern di BPKAD pada saat BPK memberikan opini wajar tanpa penecualian adalah sangat baik dengan nilai total rata-rata responden, kondisi kompetensi sumber daya manusia di BPKAD pada saat BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian adalah sangat baik dengan nilai total rata-rata responden dan penerapan akuntansi berbasis akrual di BPKAD pada saat BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian adalah sangat baik dengan nilai total rata-rata responden.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagi perusahaan Perusahaan sebagaimana dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, sebaiknya dalam membuat laporan keuangan, perusahaan atau organisasi disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem pengendalian intern dengan lebih menerapkan PP Nomor 60 tahun 2008 agar kecurangan dan penyelewengan dapat diminimalisir. Perusahaan atau organisasi juga

disarankan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikut sertakan SDM dalam pelatihan-pelatihan jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah. Perusahaan atau organisasi dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual diharapkan setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi. Dimana hal tersebut dapat membantu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

REFERENSI

- Andriani, W. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5 (1).
- Christanti, D. N. (2010). *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*.
- Connolly, C., & Hyndman, N. (2006). The Actual Implementation of Accruals Accounting - Caveats from a Case within the UK Public Sector. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 19 (2), 272–290.
- Ekrem Kara, Y. K. (2011). Accounting Recording System On Accrual Basis At Local Authorities In Turkey. *An Application In Gaziantep Local Municipality, International Journal Of Business And Social Science*, 2 (15).
- Guthrie, J. (1998). Application of Accounting in the Australian Public Sector- Rhetoric or Reality? *Financial Accountability & Management*, 14 (1), 1–19.
- Guy , dan M., Alderman, C. Wayne dan Winters, A. J. (2002). *Auditing: Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Herawti, T. (2014). Pengaruh Sistem pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Jurnal Akuntansi*, 9 (1).
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Akuntansi*, 9.

- Lapsley, I., Mussari, R., & Paulsson, G. (2009). On the Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector - A Self-evident and Problematic Reform. *Journal European Accounting Review*, 18 (4), 719–723.
- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 2337–3806.
- Pramudiarta, R. (2015). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*.
- Sari, S., & Witono, B. (2014). Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Akuntansi*.
- Soimah, S. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. *jurnal akuntansi*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi. (2008). Apakah Basis AkruaI Ditetapkan Pada Instansi Pemerintahan Secara Menyeluruh ? *Jurnal Akuntansi*, 5 (2).
- Tickell, G. (2010). Cash To Accrual Accounting. *One Nation's Dilemma. International Business & Economics Research Journal*, 9 (11), 71–78.
- Untary, N. R. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Factor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang). *Jurnal Akuntansi*, 2 (1).
- Wansyah, H., Darwanis, & Bakar, U. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1).